BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Skripsi ini menganalisis tentang peran Uni Eropa dalam upaya mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat. Balkan adalah sebuah istilah untuk menyebut kawasan Eropa di bagian Tenggara. Maka Balkan Barat adalah istilah untuk menyebut kawasan Eropa Tenggara bagian barat. Balkan juga sering disebut dengan *Balkans Peninsula* (Semenanjung Balkan). Adapun negara-negara yang termasuk di kawasan Balkan Barat adalah Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, dan Serbia (negara-negara *ex*-Yugoslavia) *plus* Albania.[1] Kawasan Balkan Barat dibatasi oleh Italia di bagian barat laut, di bagian utara dibatasi oleh Hungaria, di bagian timur laut dibatasi oleh Moldova dan Ukraina, dan di bagian selatan dibatasi oleh Turki, Yunani, serta Laut Egean. Kawasan Balkan Barat itu sendiri juga dikelilingi oleh berbagai macam laut, yaitu Laut Adriatik di bagian barat, Laut Ionia di bagian barat daya, dan Laut Hitam di bagian timur. Berbagai macam etnis juga menjadi salah satu ciri dari kawasan Balkan Barat ini.

Jika dilihat sejarahnya, negara-negara di kawasan Balkan Barat memiliki sejarah yang unik dalam sistem ideologinya. Negara-negara tersebut pernah mengalami beberapa fase dalam sistem ideologinya. Mereka pernah menjadi

[1] www.britannica.com/place/Western Balkans diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 20.08 WIB.

bagian dari *Ottoman Empire*. Dampak dari hal tersebut adalah sebagian penduduk di kawasan Balkan Barat ada yang beragama muslim, seperti di Albania, Bosnia-Herzegovina, dan Macedonia. Selama 20 tahun lamanya, Uni Soviet tidak memiliki peran apapun di negara-negara kawasan Balkan.[2] Keadaan tersebut berbalik 180 derajat di masa Perang Dingin dimana Uni Soviet memiliki peran yang sangat dominan dan eksklusif di negara-negara kawasan Balkan. Peran Uni Soviet terlihat sangat eksklusif di Albania, Bulgaria, dan Rumania. Dengan adanya pengaruh Uni Soviet di negara-negara kawasan Balkan, hal itu juga yang membuat negara-negara di kawasan Balkan Barat bersifat komunis baik dari sisi militer, strategi, politik, cara diplomasi, ideologi, dan psikologi.[3]

Lebih dari 30 tahun terjadi sebuah *democratic progress* di dunia internasional ini. Gelombang demokratisasi terjadi dimulai tahun 1970-an di bagian Eropa Selatan, kemudian merambah ke Amerika Latin (Bolivia, El-Savador, Argentina) di awal tahun 1980-an. Penyebaran demokrasi ini kemudian berlanjut lagi ke Eropa Timur, Afrika, dan Asia di akhir tahun 1980-an dan di awal 1990-an. Sistem demokrasi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari sistem liberal. Di dalamnya terdapat kebebasan individu, adanya pemilu yang regular, kebebasan media massa, dll. Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Transisi ini bisa terjadi dari rezim otoriter ke demokrasi menyeluruh, dari sistem politik otoriter atau komunis ke semi-demokrasi, atau dari sistem politik semi-otoriter ke demokrasi. Dengan adanya demokratisasi di wilayah Eropa Timur, hal ini juga mempengaruhi sistem perpolitikan di wilayah

[2] J. F. Brown, 1989, "Conservatism and Nationalism in the Western Balkans: Albania, Bulgaria, and Rumania" in *Central and Eastern Europe : The Opening Curtain?*, USA : Westview Press, hlm 286.
[3] *Ibid.*

Eropa Tenggara yaitu Balkan Barat. Arus demokratisasi di Balkan Barat ada sekitar di tahun 1989 sampai 1990-an.[4] Hal itu dibuktikan dengan adanya perubahan sistem yang semula adalah komunis (mengikuti *Soviet-style state*) menjadi lebih liberal dan demokrasi.

Gambar 1 : Peta Kawasan Balkan Barat

Negara-negara anggota di kawasan Balkan Barat ini adalah mayoritas bekas dari negara Yugoslavia. Runtuhnya Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito di tahun 1990 menyebabkan negara anggotanya saling melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Hal ini dipicu dengan berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Adanya ide demokrasi di kawasan

[4] www.academica.com/7118746/DEMOKRASI_DAN_DEMOKRATISASI diakses pada 28 Oktober 2016 pukul 16.34 WIB.

Balkan Barat memang pada awalnya dipengaruhi oleh keruntuhan komunisme Uni Soviet. Sehingga hal ini memicu negara-negara di kawasan Balkan Barat mengadopsi sistem baru yaitu demokrasi. Negara-negara anggota Yugoslavia merasa bahwa sistem komunis tidak membawa kesejahteraan dan manfaat bagi mereka. Semua akses di negara itu sangat terbatas. Maka sedikit demi sedikit, masyarakat di kawasan Balkan Barat mulai memiliki kesadaran akan pentingnya kebebasan hak individual. Akan tetapi sebagai negara yang baru merdeka, mereka belum memiliki sistem politik dan pemerintahan yang kuat. Oleh karena itu, pasca runtuhnya Yugoslavia, negara-negara *ex*-Yugoslavia memiliki sistem perpolitikan yang kacau. Hal ini ditandai dengan banyaknya perang etnis antaranegara anggota *ex*-Yugoslavia dan terjadi demonstrasi mengenai tuntutan untuk menggulingkan pemerintahan komunis.

Tentu saja dalam melewati perubahan sistem tersebut, negara-negara di kawasan Balkan Barat mengalami pergolakan dan "guncangan" politik di dalam negerinya sendiri. Tentu tidak akan mudah bagi sebuah kawasan yang sudah berpuluh-puluh tahun mengadopsi sebuah sistem, kemudian dia keluar dari sistem tersebut. Dia pasti mendapatkan tekanan dari rakyat yang kontra maupun dengan para elit yang terus ingin mempertahankan kekuasaannya. Proses transisi demokrasi di kawasan Balkan Barat adalah yang memiliki tantangan dan hambatan paling besar dibandingkan dengan Eropa Timur.[5]

Dalam hal ini, Uni Eropa memiliki peran yang besar dan penting di kawasan Balkan Barat dalam upaya demokrasi. Upaya demokratisasi di kawasan

[5] Tom Gallagher, 1998, "The Western Balkans: Bulgaria, Rumania, Albania, and the Former Yugoslavia" in *Development In Central and East European Politics*, England: Macmillan Press, hlm 43.

Balkan Barat tidak bisa terlepas dari peran Uni Eropa. Memang ada keinginan dan kemauan besar dari negara-negara di kawasan Balkan Barat untuk menjadi negara demokrasi. Akan tetapi dalam hal ini, adanya perkembangan demokratisasi di kawasan Balkan Barat tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dari faktor eksternal yaitu Uni Eropa.

Uni Eropa pada awalnya merupakan suatu organisasi regional yang anggotanya adalah negara-negara Eropa Barat. Namun seiring berjalannya waktu, perluasan Uni Eropa tidak dapat dihindarkan dan mulai seperti kebutuhan Uni Eropa sendiri. Sejak akhir dekade 1990-an, Uni Eropa mulai bertujuan untuk mengembangkan Eropa yang lebih luas agar dapat melebarkan pengaruhnya, terlebih sejak keruntuhan Uni Soviet dan Yugoslavia terjadi. Uni Eropa berencana untuk menciptakan hubungan yang baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial dengan negara-negara tetangga barunya di Eropa Timur pasca keruntuhan dua negara besar tersebut. Dalam upaya perluasan Eropa, promosi demokrasi yang dilakukan Uni Eropa kepada negara-negara tetangganya adalah isu yang cukup penting mengingat bahwa negara-negara Eropa Timur adalah negara yang sebelumnya berada dalam pengaruh ideologi komunis yang besar.

Peran Uni Eropa dalam upaya demokratisasi di kawasan Balkan Barat dimulai pada tahun 1999. Hal ini disebabkan karena di tahun tersebut sebagian besar negara di kawasan Balkan Barat mendaftarkan negaranya menjadi negara anggota Uni Eropa. Kawasan Balkan Barat sangat tertarik untuk menjadi negara anggota Uni Eropa karena Uni Eropa menjamin kemakmuran bersama negara anggota, mendorong pertumbuhan ekonomi negara anggota dan negara kandidat,

mendukung kekuatan demokratis, dan menghapus sistem kediktatoran. Bagi Uni Eropa, demokrasi merupakan elemen inti dari identitas politik Eropa dan merupakan karakteristik esensial bagi negara-negara yang berkeinginan menjadi anggota Uni Eropa. Sampai hari ini, negara-negara di kawasan Balkan Barat seperti Albania, Serbia, Montenegro, Macedonia telah menjadi *candidate countries* untuk masuk ke Uni Eropa. Sedangkan Kosovo dan Bosnia-Herzegovina, baru menjadi *potential candidate countries* untuk menjadi anggota Uni Eropa.[6] Negara di kawasan Balkan Barat yang telah menjadi negara anggota Uni Eropa adalah Kroasia yaitu pada tahun 2013.

Uni Eropa sendiri juga memiliki kepentingan di kawasan Balkan Barat yaitu *EU Enlargement* (Perluasan Uni Eropa). Hal ini sesuai kebijakan Uni Eropa yang tertuang dalam pasal 49 *Treaty of European Union*.[7] Dengan kebijakan perluasan ini maka dapat memperkokoh posisi Uni Eropa dan memperkuat pengaruh Uni Eropa di dunia internasional.

Melihat komunisme negara-negara di kawasan Balkan Barat yang sudah berakar berpuluh-puluh tahun dan dinamika fase sistem ideologi yang mereka anut, tentu akan sangat terkejut melihat negara-negara di kawasan Balkan Barat menganut sistem demokrasi di masa sekarang. Berkembangnya arus demokratisasi di Balkan Barat tidak hanya berasal dari keinginan negara-negara di Balkan Barat, tetapi ada faktor internasional yaitu Uni Eropa yang mendorong agar negara-negara di Balkan Barat menjadi demokrasi. Proses, dinamika, dan fase yang dialami oleh negara-negara pecahan *ex*-Yogaslavia ini sangatlah

[6] www.europa.eu diakses pada 29 Oktober 2016 pukul 21.44 WIB.
[7] Panji Noor Hamzah, 2015, Skripsi: *Bergabungnya Kroasia menjadi Anggota Uni Eropa*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 54.

menarik untuk dilihat proses pengadopsian demokrasi ala liberal, karena mereka mampu keluar dari sistem komunis.

Hal itulah yang menjadi alasan bagi penulis untuk melihat, mempelajari, dan meneliti arus demokratisasi di Balkan Barat. Upaya untuk mendorong ide demokratisasi yang dilakukan oleh Uni Eropa di kawasan Balkan Barat sangat menarik bagi penulis untuk diteliti agar dapat dijadikan sebuah informasi dan ilmu bagi orang lain yang membacanya.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat adanya arus demokratisasi di kawasan Balkan Barat, ingin diketahui seperti apa upaya demokratisasi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah yang ada adalah **"Bagaimana upaya Uni Eropa dalam mendorong demokratisasi di negara-negara kawasan Balkan Barat?"**

C. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Konsep Demokratisasi

Demokrasi sendiri berarti sebuah pemerintahan yang ada di tangan rakyat (untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat). Pemikiran tersebut dicetuskan oleh Abraham Lincoln. Sistem demokrasi sendiri diadopsi dari ideologi liberal. Di dalam sistem demokrasi itu sendiri ada kebebasan individu, adanya pemilu yang regular, kebebasan media massa, dll. Proses penyebaran sistem demokrasi di dunia ini adalah berasal dari Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai pusatnya. Akhir dari Perang Dingin pada saat itu

membuka keoptimisan bagi negara-negara di Dunia Ketiga untuk mengadopsi sistem demokrasi. Demokratisasi merupakan salah satu isu yang banyak mendapatkan perhatian setelah usainya Perang Dingin sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan di sejumlah negara dari otoriter menjadi demokratis.

Dengan semakin kuatnya pengaruh Amerika Serikat dan Eropa Barat terutama Uni Eropa di dunia, perluasan demokrasi ini semakin gencar dilakukan, terlebih ketika kekuatan komunis jatuh dengan runtuhnya Uni Soviet di tahun 1990-an. Berdasarkan data dari *Economic Intelligence Unit*, jumlah negara demokrasi di tahun 2015 mencapai 167 negara, dimana di negara tersebut terdapat ide-ide pluralisme, kebebasan sipil, dan *political culture*.

Menurut Kamus Hubungan Internasional karya Khasan Ashari yaitu seorang lulusan pascasarjana dari *Research School of Pacific and Asian Studies* dan *Asia Pacific College of Diplomacy* dan dua program studi di *Australian National University* Canberra di bidang hubungan internasional dan diplomasi mengatakan bahwa demokratisasi adalah proses menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan untuk menggantikan sistem pemerintahan non-demokratis (otoriter, komunis, dll) yang sebelumnya diterapkan. Kriteria yang dipakai untuk mengukur tingkat demokrasi suatu negara antara lain adalah (1) terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum yang bebas dan terjadwal; (2) tindakan pemerintah yang diatur oleh

konstitusi dan berdasarkan komitmen terhadap kebebasan sipil; dan (3) pergantian kekuasaan yang dilakukan secara damai.

Demokratisasi dapat dilihat jika dalam suatu negara non-demokrasi sudah mulai terkapitalisasi dan terindustrialisasi sistem ekonominya (ekonomi pasar).[8] Ciri lainnya dari adanya upaya demokratisasi itu adalah adanya upaya untuk mengubah kekuasaan yang berpusat pada negara menjadi kekuasaan yang berpusat pada *civil society*. Hal ini membuat negara tidak memiliki hak "*supernatural*" karena kedaulatan ada di tangan rakyat.[9]

Indikator lainnya ketika negara tersebut mengadopsi sistem demokrasi menurut Robert A Dahl adalah (1) kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi, (2) kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, (3) hak untuk memilih dalam pemilihan umum, (4) hak untuk menduduki jabatan publik, (5) hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara, (6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif, (7) terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur, dan (8) adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada suara dalam pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.

Dalam hal ini, ada upaya demokratisasi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Balkan Barat pasca runtuhnya komunis di negara tersebut. Ada perubahan sistem pemerintahan dan ideologi di kawasan Balkan Barat dari komunis menjadi demokratis. Dalam mengupayakan

[8] T. Landman dan J. Foweraker, 1997, *Citizenship Rights and Social Movement,* Oxford, Oxford University Press, hlm 75-77.

[9] Martin Griffiths and Terry O'Callaghan, 2002, *International Relations: The Key Concepts*, London and New York: Routledge, hlm 70.

demokratisasi di negara Balkan Barat, terdapat peran dari Uni Eropa dalam membantu dan mempromosikan demokrasi di kawasan tersebut.

Demokrasi merupakan hal pertama dan mutlak yang ditekankan bagi setiap negara yang mengajukan diri untuk menjadi bagian dari Uni Eropa. Penekanan oleh Uni Eropa ini merefleksikan bahwa demokrasi merupakan elemen inti dari identitas politik Eropa dan merupakan karakteristik esensial bagi negara-negara yang berkeinginan menjadi anggota Uni Eropa. Selain itu, calon negara anggota pun harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia, perlindungan terhadap minoritas, aturan hukum yang berlaku sama bagi seluruh masyarakatnya, dan ekonomi nasional yang berbasis pada pasar.

2. Teori Peran Internasional dalam Proses Demokratisasi

Arus demokratisasi di dalam sebuah negara maupun kawasan dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya berasal dari faktor internal bahwa keinginan untuk menjadi sebuah negara demokrasi datang dari dalam negara atau kawasan itu sendiri. Seymour Martin Lipset di tahun 1959 mengatakan bahwa modernisasi contohnya seperti tingginya pendidikan, tingginya urbanisasi, banyaknya orang yang bekerja di industri, dll menyebabkan terjadinya demokrasi.[10] Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Przeworski dan *co-authors* (1997, 2000) bahwa tidak ada hubungan antara level pertumbuhan ekonomi dan transisi untuk menjadi

[10] Barbara Geddes, 2009, "What Causes Democratization?" In C. B. Stokes, *The Oxford Handbook of Comparative Politics* (pp. 317-339), London: Oxford University Press, hlm 318.

demokrasi.[11] Pernyataan dari Przeworski didukung juga oleh Gleditsch dan Choun (2004) bahwa tidak ada hubungan antara level pertumbuhan ekonomi dan demokrasi.

Akan tetapi, arus demokratisasi di dalam sebuah negara maupun kawasan dapat terjadi karena adanya faktor eksternal. Banyak analis yang mengklaim bahwa faktor internasional mempunyai peran yang lebih besar di dalam proses demokratisasi dibandingkan faktor-faktor yang telah kita pelajari sebelumnya.[12] Faktor eksternal/ aktor internasional dapat memiliki peran dan pengaruh yang signifikan untuk mendorong adanya transisi demokrasi di suatu negara atau kawasan, walaupun tidak bisa mengubah sistem negara tersebut sepenuhnya.[13]

Di tahun 1980-an dan 1990-an setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet, peran aktor internasional/ faktor eksternal benar-benar sangat terlihat dalam proses demokratisasi. Faktor internasional itu bisa negara atau organisasi internasional. Ada 5 bagian penting yang harus ditekankan oleh aktor internasional dalam mendemokratisasikan sebuah negara atau kawasan yaitu (1) adanya pemilu yang reguler, (2) partai politik (multipartai), (3) *judicial reform,* (4) *civil society*, dan (5) media massa.[14] Aktor internasional harus menguatkan sumber daya, keterampilan,

[11] *Ibid.,* hlm 320.
[12] *Ibid.,* hlm 319.
[13] Lise Rakner (Chr. Michelsen Institute), A. R, 2007, Democratisation's Third Wave and the Challenges of Democratic Deepening: Assessing International Democracy Assistance and Lessons Learned, *Research project (RP-05-GG) of the Advisory Board for Irish Aid* , hlm 8.

[14] *Ibid.,* hlm 4.

kapabilitas dan ide dari asosiasi *civil society*, media massa, *judiciary*, dan komisi pemilihan umum di negara atau kawasan tersebut.

Aktor internasional/ faktor eksternal mampu mendorong demokratisasi di sebuah negara maupun kawasan.[15] Dorongan untuk mendemokratisasikan sebuah negara atau kawasan dapat dilakukan dengan cara (1) memperkuat proses pemilihan umum secara demokratis, (2) membina kerjasama dengan institusi dan organisasi pluralisme demokratis, (3) mendorong pembentukan partai politik, (4) mendorong stabilitas keamanan dan perdamaian domestik, (5) memperkuat penghormatan dan penegakan terhadap hukum dan HAM (hak buruh, hak minoritas, dan hak perempuan), (6) mendorong perkembangan NGO, (7) memperkuat kapasitas administrasi, misalnya dengan mengurangi tingkat korupsi, (8) mendorong perkembangan media massa yang terbuka, (9) mendorong pertumbuhan ekonomi pasar, (10) mendorong pertumbuhan swastanisasi (*private sector*), (11) memberikan bantuan dana untuk menunjang demokratisasi.[16]

Tekanan internasional seperti finansial memiliki efek yang sangat besar terhadap demokratisasi, terlebih lagi jika ada interaksi yang kuat antara faktor internasional dan faktor domestik. Jon Pevehouse (2002) mengatakan bahwa organisasi internasional regional yang dimana sebagian besar anggotanya adalah negara yang demokratis, cenderung dapat

[15] Glenn, J. K, 1999, International Actors and Democratization : US Assistance to New Political Parties in the Czech Republic and Slovakia, *EUI Working Paper SPS No. 99/7* , hlm 8.

[16] Fidel Aksoy, 2012, *Dissertation: Significance of External F/Actors In The Democratization Process: Case of Turkey, The European Union, and The Kurdish Problem,* Berlin: Department of Political and Social Sciences of Freie Universität Berlin, hlm 92.

meningkatkan terjadinya proses demokratisasi.[17] Tentu saja hal tersebut dapat mempengaruhi negara atau kawasan tetangganya untuk berubah menjadi sebuah negara demokratis.

Menurut Levitskya dan Way (2006) memperlihatkan bahwa di akhir Perang Dingin rezim otoriter yang mempunyai hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat akan cenderung untuk berubah menjadi demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari institusinya, misalnya seperti pemilu multipartai.

Pandangan lain yang menguatkan bahwa demokratisasi bisa berasal dari faktor internasional adalah datang dari Gleditsch dan Ward (2006), bahwa aktor eksternal dapat mempengaruhi kekuasaan sekelompok orang tertentu di dalam institusi politik, baik dari segi persepsinya maupun strategi.[18] Negara dan aktor transnasional dapat mendemokratisasikan sebuah negara atau kawasan dengan cara menguatkan keinginan aktor domestik agar merubah sistemnya menjadi demokrasi dan melemahkan kekuasaannya dari rezim yang bersifat otoriter.

Pernyataan lain yang menguatkan bahwa peran internasional dapat mempengaruhi demokratisasi adalah dari Brinks dan Coppedge (2006) bahwa sebuah negara atau beberapa negara dapat mengimitasi negara atau kawasan tetangganya agar tercipta rezim yang sama. Dimana jika kedua belah pihak memiliki rezim yang sama, maka dapat tercipta perdamaian,

[17] Barbara Geddes, 2009, "What Causes Democratization?" in C. B. Stokes, *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, London: Oxford University Press, hlm 329.

[18] Camila Martins O da Silva Nogueira, 2009, The Influence of International Factors in The Process of Democratization, *Brazilian Political Science Review, University of Sao Paulo Brazil* , hlm 16.

keamanan bersama, perdagangan, investasi, komunikasi yang lancar, dll. Maka, jika negara atau kawasan tersebut memiliki sistem demokrasi, maka dia dapat mengimitasi negara atau kawasan tetangganya untuk merubah sistemnya menjadi demokrasi.

Dalam hal ini, Uni Eropa dapat disebut sebagai aktor internasional/ faktor eksternal yang memiliki peran dalam proses demokratisasi di kawasan Balkan Barat. Di negara-negara kawasan Balkan Barat, Uni Eropa mampu mendorong reformasi politik negara-negara Balkan Barat yang sebelumnya komunis dan otoriter, menjadi liberal dan demokrasi. Hal itu dapat ditandai dengan adanya pemilu yang reguler, munculnya partai-partai, adanya ide-ide demokrasi yang bermunculan dari *civil society*, dan sistem ekonomi kapitalis. Walaupun keinginan untuk menjadi negara demokrasi memang datang dari negara-negara di kawasan Balkan Barat sendiri untuk lepas dari komunis dan menjadi negara independen.

Dalam hal ini, Uni Eropa sangat efektif dalam mempromosikan demokrasi ke kawasan lain, mengingat Balkan Barat adalah kawasan tetangga dari negara-negara Eropa Barat. Tentunya dengan kedekatan geografis ini, membuat transisi demokrasi di kawasan Balkan Barat menjadi lebih mudah karena Balkan Barat dan Eropa Barat memiliki komunikasi yang lancar. Ditambah lagi bahwa ide demokrasi berasal dari Eropa Barat, maka hal ini juga mempermudah terjadinya proses demokratisasi di Balkan Barat. Uni Eropa mampu mempengaruhi pemerintahan di Balkan Barat untuk menguatkan keinginan aktor domestik dalam rangka melemahkan

kekuasaan otoriternya, untuk kemudian berubah menjadi demokratis. Kemudian, untuk menciptakan perdamaian, keamanan bersama, perdagangan, dan investasi di kawasan regional Eropa, Uni Eropa berusaha untuk menciptakan sebuah rezim yang sama yaitu sistem demokrasi. Sehingga Uni Eropa, berusaha untuk mendorong kawasan tetangganya untuk memiliki rezim yang sama dengan Uni Eropa yang bersistem demokrasi agar tercipta keamanan bersama.

3. Konsep *Common Foreign and Security Policy* (CFSP)

Dalam kamus hubungan internasional karya Khasan Ashari disebutkan bahwa CFSP (Politik Luar Negeri dan Keamanan Bersama) adalah sebuah kebijakan luar negeri yang disepakati secara kolektif oleh negara-negara Uni Eropa yang mencakup aspek diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan *(defence and security).* Kebijakan kolektif ini harus diputuskan secara bulat *(unanimity)* oleh seluruh anggota Uni Eropa melalui lembaga *Council of the European Union* atau Dewan Uni Eropa.[19] CFSP adalah salah satu alat bagi Uni Eropa untuk berbicara di dunia internasional dan salah satu kekuatan Uni Eropa dalam bidang politik dan ekonomi.[20] CFSP adalah struktur formal yang mengijinkan negara anggota untuk mengkoordinasikan kebijakan bersama dan menegaskan identitas politik yang melekat pada Uni Eropa. Aspek-aspek yang menjadi cakupan

[19] Khasan Ashari, 2015, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: Nuansa, hlm 108.

[20] http://www.euintheus.org/what-we-do/policy-areas/foreign-affairs-and-defense/common-foreign-and-security-policy/.

CFSP ditetapkan dalam *Lisbon Treaty* yang mulai berlaku bulan Desember 2009 yang diratifikasi oleh 27 negara anggota, yang meliputi (1) pengamanan nilai bersama, kepentingan dasar, independensi, dan integritas Uni Eropa sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB; (2) peningkatan keamanan dan pemeliharaan perdamaian Uni Eropa secara keseluruhan; (3) peningkatan kerjasama internasional; dan (4) pembangunan dan konsolidasi demokrasi dan penegakan hukum berdasarkan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan.

Ide mengenai CFSP awalnya berasal dari *Maastricht Treaty* di tahun 1993 yang berisi tentang area mengenai politik luar negeri dan keamanan Uni Eropa, yang kemudian diperkuat oleh *Amsterdam Treaty* dan *Nice Treaty* di tahun 1999 dan 2001. CFSP sendiri berdasarkan *Maastricht Treaty* menjadi pilar kedua dari tiga pilar yang ada di Uni Eropa. Sebelum ada CFSP, Uni Eropa memiliki aturan bersama yang bersifat informal mengenai politik luar negeri di tahun 1970-an di bawah *European Political Co-operation* (EPC). Akan tetapi, EPC ini dianggap memiliki banyak kekurangan dan kurang proaktif.

Untuk mencapai keempat tujuan dari CFSP, diimplementasikan dengan cara (1) menentukan prinsip-prinsip umum dan *guidelines* untuk CFSP, (2) menentukan strategi bersama; (3) mengadopsi *joint actions*[21]*;* (4)

[21] *Joint action* dilakukan pada situasi yang dipandang perlu dengan tujuan, cakupan, dan cara yang disepakati bersama.

mengadopsi *common position*[22]; (5) memperkuat kerjasama sistematis antara anggota-anggota negara dalam pelaksanaan kebijakan.

Adapun aktor-aktor yang terdapat di dalam CFSP adalah *pertama*, Dewan Eropa (*The European Council).* Dewan Eropa memiliki level kekuasaan tertinggi di CFSP. Dewan Eropa bertanggung jawab untuk mengatur prinsip-prinsip umum, menentukan prioritas, arahan politik, dan menentukan strategi-strategi bersama dalam melaksanakan CFSP. Pertemuan Dewan Eropa ini dilakukan dua kali setiap enam bulan dalam setahun. *Kedua, General Affairs and External Relations Council* (GAC) bersama menteri luar negeri dari setiap negara anggota Uni Eropa.[23] Aktor ini mempunyai peranan sebagai badan utama pembuat keputusan untuk CFSP, yang mengimplementasikan strategi umum dari Dewan Eropa melalui *joints actions* dan *common positions*. Para kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri dari setiap negara anggota adalah menjadi *key actors* di dalam CFSP ini. Semua keputusan tentang kebijakan luar negeri dan keamanan bersama adalah dibuat hanya berdasarkan pada kebulatan suara (*unanimity).*

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional regional yang sangat unik dalam aspek-aspek tertentu. Keunikan tersebut misalnya dapat dilihat dari kewenangan Uni Eropa yang satu suara dalam bidang ekonomi yaitu di WTO. Uni Eropa tidak memerlukan pertimbangan dari setiap

[22] *Common position* merujuk pada panduan mengenai isu atau wilayah geografis tertentu yang harus direfleksikan dalam kebijakan nasional negara-negara anggota.

[23] http://www.politics.co.uk/reference/common-foreign-and-security-policy diakses pada 11 November 2016 pukul 18.29 WIB.

negara yang ada di Eropa, karena ada aturan ekonomi di Uni Eropa yaitu *The European Single Market*.

Walaupun suara di dalam CFSP ini juga kompak, tetapi suara mereka di dalam bidang politik tidak sekompak dengan suara di bidang ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari keanggotaan NATO. Ada negara Eropa yang menjadi anggotanya, adapula negara Eropa yang tidak menjadi anggotanya.

Dalam bidang demokrasi, Uni Eropa juga satu suara. CFSP juga berlaku dalam membantu upaya demokratisasi di kawasan Balkan Barat. Promosi demokratisasi tidak hanya dilakukan oleh negara tertentu di Uni Eropa, tetapi keputusan tersebut diambil berdasarkan suara mayoritas atau kebulatan suara di Uni Eropa, mengingat bahwa CFSP ini juga mengatur dalam bidang demokrasi. Negara-negara anggota Uni Eropa, memiiliki satu suara untuk mempromosikan demokrasi ke kawasan atau negara lain termasuk Balkan Barat.

D. HIPOTESA

Uni Eropa mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat dengan cara:

Mendorong dan memfasilitasi pemerintahan di negara-negara kawasan Balkan Barat dengan memperkuat lembaga demokrasi atau institusi politik serta mendorong dan memfasilitasi terjadinya reformasi sistem ekonomi menjadi sistem ekonomi pasar.

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun beberapa tujuan yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap peran Uni Eropa dalam upaya demokratisasi di negara-negara kawasan Balkan Barat adalah :

1. Untuk mengetahui seperti apa peran atau upaya Uni Eropa dalam mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses demokratisasi di negara-negara kawasan Balkan Barat.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu waktu tertentu.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini menggunakan bahan-bahan pustaka seperti jurnal-jurnal, buku-buku, artikel, dan surat kabar. Tambahan data-data bisa juga berasal dari internet atau situs-situs yang relevan atau berkesinambungan dengan judul penelitian.

G. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian yang saya buat adalah dari tahun 1999-2016, karena hubungan antara Uni Eropa dan Balkan Barat dalam demokratisasi terjadi pada rentang di tahun tersebut. Sehingga saya membatasi ruang lingkup penelitian saya dari tahun 1999-2016.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan skripsi ini, dibagi menjadi 5 bab pemaparan mengenai topik skripsi ini. Kemudian, terdapat beberapa sub-bab yang akan memperinci dan menjelaskan lebih detail dari garis besar bab-bab yang sebelumnya sudah ditulis. Hubungan antarbab tersebut sangat bersifat sistematis dan berkaitan satu sama lain, yang dimana akan mempermudah pembaca memahami isi skripsi ini dan juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis.

BAB I

Bab ini mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

Bab ini berisi mengenai problem demokrasi di kawasan Balkan Barat.

BAB III

Dalam bab ini akan dianalisis peran Uni Eropa dalam mendorong dan memfasilitasi pemerintahan di negara-negara kawasan Balkan Barat dengan cara

memperkuat lembaga demokrasi atau institusi politik dalam upayanya menuju negara demokrasi.

BAB IV

Dalam bab ini akan dianalisis peran Uni Eropa dalam mendorong dan memfasilitasi pemerintahan di negara-negara kawasan Balkan Barat untuk mereformasi sistem ekonominya menjadi sistem ekonomi pasar, serta akan dianalisis mengenai perkembangan demokratisasi di kawasan Balkan Barat.

BAB V

Berisi tentang kesimpulan dari skripsi ini yang berupa rangkuman dari BAB I – BAB IV dan sub-bab yang telah dijelaskan terperinci. Sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi ini.